

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era digital modernisasi, perkembangan teknologi dan informasi telah tersebar luas di penjuru daerah dan dijangkau ke wilayah pedalaman serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Secara tidak langsung pemerintah ikut serta dalam pembangunan supaya dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa merupakan sebuah organisasi dengan struktur pemerintahan terkecil, maksud terkecil yaitu organisasi yang memiliki otoritas dengan luas dan jangkauan kecil. Pengertian desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah:

”Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan rakyat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia.”

Dalam pengertian tersebut bahwa desa memiliki otoritas dalam mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Otoritas tersebut dipegang oleh pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat mengelola dengan berpedoman pada budaya setempat dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik (Ruru dkk, 2017).

Dalam hal ini pemerintah desa mengupayakan dalam bentuk pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah menerima dana desa dan dikelola sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dengan tujuan

mencapai asas transparansi anggaran, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Secara Nasional Dana Desa mulai diberikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 dengan kisaran setiap Desa memperoleh kurang lebih Rp 1 Milyar tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis (Solikhah dkk, 2018). Dengan keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah desa dapat mengelola keuangan tersebut dan kekayaan milik desa.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi serta akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan dana desa. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai keadaan keuangan pada suatu entitas. Laporan keuangan berguna untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketatannya terhadap undang-undang (SAP, 2010). Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengungkapan dalam bentuk laporan digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian atas hasil kinerja aparatur desa serta sebagai media dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa (Puspasari dan Purnama, 2018)

Laporan keuangan pengelolaan keuangan desa diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Tujuannya agar laporan keuangan lebih akuntabel dan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibangunkan dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah pusat melalui BPKP memberikan aplikasi pengelolaan keuangan desa berupa sistem keuangan desa (SISKEUDES) untuk membantu dan memudahkan para perangkat desa dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara cepat dan efisien.

SISKEUDES merupakan salah satu bentuk perbaikan pemerintah dalam mengelola laporan keuangan serta pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih efektif, efisien, dan transparansi (Wiguna dkk, 2018). Tujuan dikembangkan aplikasi Siskeudes yakni guna mempermudah perangkat desa dalam pembuatan peraturan APBDesa yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui aplikasi SISKEUDES, perangkat desa diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa seperti kasus pada sebelumnya.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014).

Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga pelaporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu (Pujanira dan Taman, 2017). Kompetensi diperlukan guna menunjang pelaksanaan demi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang berada didalamnya (Zubaidi dkk, 2020).

Pengendalian internal dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. sama halnya dengan pemerintah, dari rancangan hingga pelaporan dibutuhkan pengendalian internal agar dapat terkontrol dan mencapai tujuan yang direncanakan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. SPIP merupakan sistem yang dirancang guna mencapai keandalan laporan keuangan yang efektif dan efisien serta akuntabilitas dan transparan. Dalam pengelolaan keuangan perlu adanya pengawasan, faktanya dilapangan menunjukan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan masih terbatas dan kurang fokus (Prasetya dkk, 2017), Sehingga pada pengelolaan keuangan perlu adanya pengendalian internal dari pihak kepala desa maupun perangkat desa lainnya.

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Adillah dkk (2019) menghasilkan kompetensi sumber daya dan penerapan SISKEUDES berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Lisda dkk (2017) menghasilkan implementasi SIMDA desa, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Puspasari dan Purnama (2018) kompetensi

sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas data, dukungan manajemen, dan kualitas sistem tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2019) menghasilkan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah (2019) menghasilkan sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Made Yeni (2018) menghasilkan penerapan sistem keuangan dana desa (SISKEUDES) efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa.

Pada tahun 2019 pemerintah kabupaten Purbalingga mewajibkan kepada seluruh desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES. Pada artikel Gatra.com menyebutkan bahwa dari 224 desa, hanya 54 desa yang sudah menerapkan SISKEUDES (Hidayat, 2019). Salah satu kendala dalam pelaksanaan SISKEUDES yaitu ketersediaan sumber daya manusia, hal tersebut dipengaruhi dari segi kualitas dan kuantitas ditambah beberapa orang yang masih belum menguasai komputer. Kekurangan perangkat desa juga menjadi kendala dalam penerapan SISKEUDES. Alasan lain mewajibkan SISKEUDES yaitu menjadi salah satu syarat penyaluran dana desa dan alokasi dana desa (ADD). Selain itu penggunaan SISKEUDES didasarkan semangat transparansi anggaran sehingga masyarakat bisa melihat APBDesa (Hidayat, 2019). Sehingga

peneliti tertarik dengan kualitas laporan keuangan desa setelah penerapan sistem keuangan desa Kabupaten Purbalingga, apakah implementasi SISKEUDES mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan desa Kabupaten Purbalingga. Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Kabupaten Purbalingga”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Pemerintah kabupaten Purbalingga sedang gencar-gencarnya menerapkan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di seluruh desa Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2019 Bupati Purbalingga memberi instruksi kepada pemerintahan desa untuk menerapkan SISKEUDES. Penerapan SISKEUDES menjadi salah satu syarat dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pemerintahan desa wajib menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Dari penerapan SISKEUDES muncul pertanyaan yaitu apakah implementasi SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan menabah beberapa faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa. Dari topik tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Apakah implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah :

Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa yang ada di desa Kabupaten Purbalingga setelah adanya implementasi sistem keuangan desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memberikan tambahan pengetahuan serta dapat dipergunakan dalam mengembangkan penelitian pada masa yang akan datang pada bidang Akuntansi Sektor Publik terlebih mengenai sistem keuangan desa serta kualitas laporan keuangan desa.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terlebih dalam kualitas laporan keuangan dan penerapan sistem keuangan desa.

3. Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa, sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa



## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian. Sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori yang menjadi pembahasan secara terperinci yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti teori tentang pemerintah desa, keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan desa, kualitas laporan keuangan, sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai metode dalam penelitian yang terdiri dari objek penelitian, populasi penelitian, sampel dan Teknik pengumpulan sampel, variabel penelitian, operasional variabel, model penelitian, jenis dan Teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan rencana pembahasan.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari analisis data dan uji hipotesis serta pembahasan atas hasil dari analisis data.



## BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian atas analisis data serta keterbatasan penelitian dan saran.

